

JURNAL

MEDIA HUKUM

TERAKREDITASI No. 1130/E5.2/TU/2016

- H. 1 Peluang Titik Berat Otonomi Pada Daerah Provinsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
MUHAMMAD FAUZAN
- H. 20 Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematik Putusan Non-Executable PTUN Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
RANI ARVITA
- H. 37 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif
IRWAN SAFARUDDIN HARAHAP
- H. 48 Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No. 92 Tahun 2015
HERI PURWANTO
- H. 62 Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
DEWI NURUL MUSJARI
- H. 76 Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
MILDA ISTIQOMAH
- H. 87 Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
IEDI SUDRAJAT, AGUS MULYA KARSONA
- H. 95 Sanksi Pidana Pameriksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
FITRI WAHYUNI
- H. 110 Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia
SOLIDAMAN BERTHO PLAITUKA
- 121 Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia
MARTINUS SARDI